

Pendidikan Kabupaten Batanghari: Potret dan Insight untuk Warga

Kategori: Majulah Pendidikan · Diunduh dari BalaiWarga.NET

Pendidikan Kabupaten Batanghari: Potret dan Insight untuk Warga Diperbarui 18 Juli 2026

Gambaran Umum Pendidikan Kabupaten Batanghari

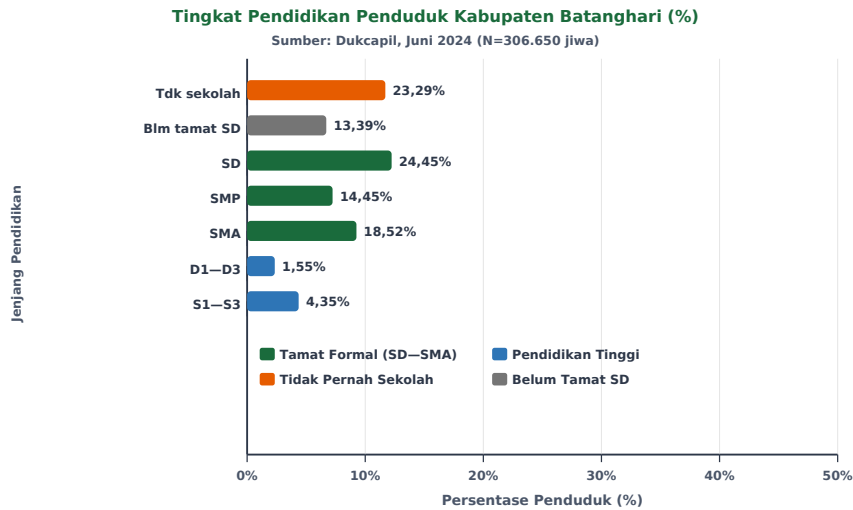
Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) per Juni 2024, penduduk Kabupaten Batanghari berjumlah 306.650 jiwa dengan hanya 5,9% berlatar pendidikan tinggi (D1—S3). Menurut DaftarSekolah.net yang bersumber dari Dapodik, terdapat 61 SMP (46 negeri, 15 swasta), 17 SMA (11 negeri, 6 swasta), dan 11 SMK (9 negeri, 2 swasta) yang aktif. Menurut BPS Kabupaten Batang Hari (2024), tingkat kemiskinan Maret 2024 sebesar 8,63%, turun dari 9,45% pada tahun 2023. Menurut data Dukcapil (2024), 23,29% penduduk belum pernah mengenyam pendidikan formal. Menurut DaftarSekolah.net, akreditasi A pada jenjang SMA mencapai 47,06%, sementara jenjang SMP baru 13,11% yang meraih akreditasi A. Data IPM, Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) spesifik Kabupaten Batanghari tahun 2023-2024 sedang diperbarui — pantau di balaiwarga.net.

23% Warga Batanghari Belum Pernah Sekolah — dan Hanya 6 dari 100 Penduduk Tamat Perguruan Tinggi

Menurut data Dukcapil (Juni 2024), Kabupaten Batanghari, Jambi mencatat 23,29% penduduk tanpa riwayat pendidikan formal, angka yang melampaui rata-rata nasional dan menunjukkan tantangan akses yang masih nyata di wilayah ini. Di sisi lain, 47% SMA yang ada telah terakreditasi A. Warga dapat mengecek akreditasi sekolah sebelum mendaftar melalui ban-pdm.id.

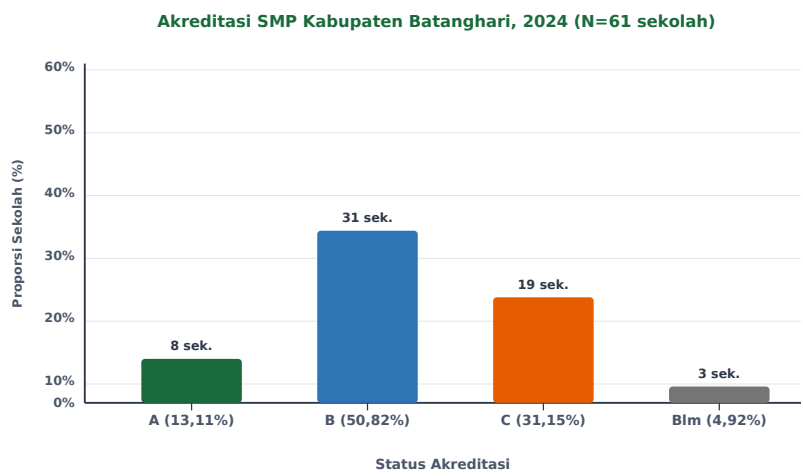
Infografis Data Pendidikan Kabupaten Batanghari

Distribusi Tingkat Pendidikan Penduduk Batanghari, 2024



Sumber: Dukcapil, Juni 2024. Sebesar 36,68% penduduk Batanghari berada di level belum/tidak tamat SD atau tidak pernah sekolah.

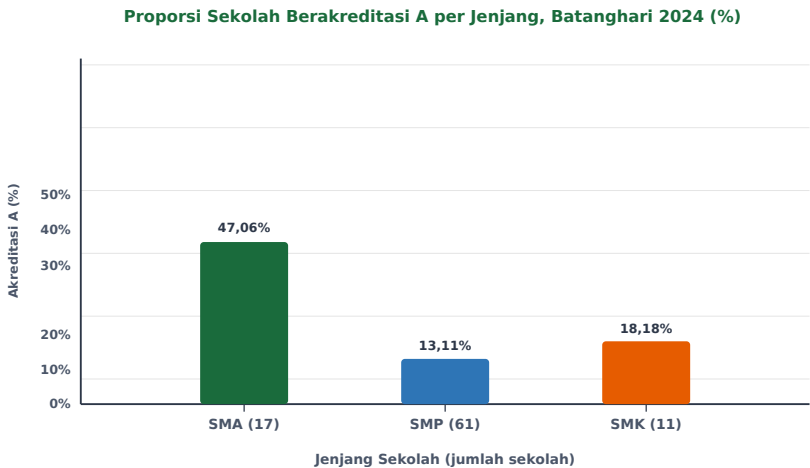
Menurut data Dukcapil per Juni 2024, dari 306.650 penduduk Kabupaten Batanghari, proporsi terbesar adalah lulusan SD sebesar 24,45%, diikuti kelompok yang tidak pernah sekolah (23,29%) dan lulusan SMA (18,52%). Gabungan penduduk tanpa akses atau tidak tamat SD mencapai 36,68%, angka yang mengindikasikan tantangan literasi dasar yang signifikan di wilayah ini. Di sisi lain, pemegang gelar D1—S3 hanya 5,9% dari total populasi, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai sekitar 10% untuk kelompok berpendidikan tinggi.



Sumber: DaftarSekolah.net/Dapodik, 2024. Mayoritas SMP Batanghari (50,82%) terakreditasi B; hanya 13,11% mencapai akreditasi A.

Menurut DaftarSekolah.net yang bersumber dari Dapodik (2024), dari 61 SMP di Kabupaten Batanghari, sebagian besar (50,82%) berada di peringkat akreditasi B, sedangkan akreditasi A baru diraih oleh 8 sekolah (13,11%). Sebanyak 19 SMP (31,15%) masih berakreditasi C, dan 3 sekolah (4,92%) belum terakreditasi. Kondisi ini menempatkan kualitas layanan pendidikan menengah pertama di Batanghari sebagai indikator yang perlu terus ditingkatkan, khususnya bagi warga yang tinggal di kecamatan terpencil.

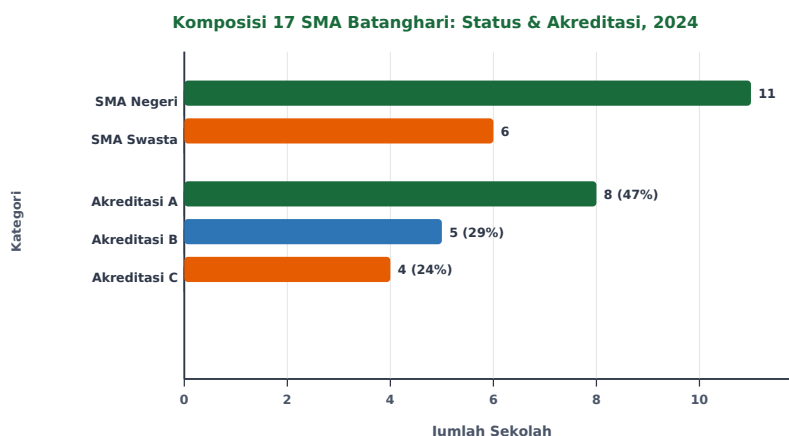
Akreditasi SMA Kabupaten Batanghari Dibandingkan SMP dan SMK, 2024



Sumber: DaftarSekolah.net/Dapodik, 2024. SMA memimpin dengan 47,06% sekolah berakreditasi A, sementara SMP hanya 13,11%.

Perbandingan lintas jenjang menunjukkan disparitas mutu yang mencolok di Kabupaten Batanghari. Menurut DaftarSekolah.net/Dapodik (2024), jenjang SMA mengungguli dengan 47,06% sekolah berakreditasi A — angka yang baik untuk ukuran kabupaten di Jambi. Namun jenjang SMP, yang menampung jumlah sekolah paling banyak (61 unit), hanya menempatkan 13,11% sekolahnya di peringkat A. Jenjang SMK mencapai 18,18%. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa kualitas layanan pendidikan di Batanghari tidak merata antar jenjang.

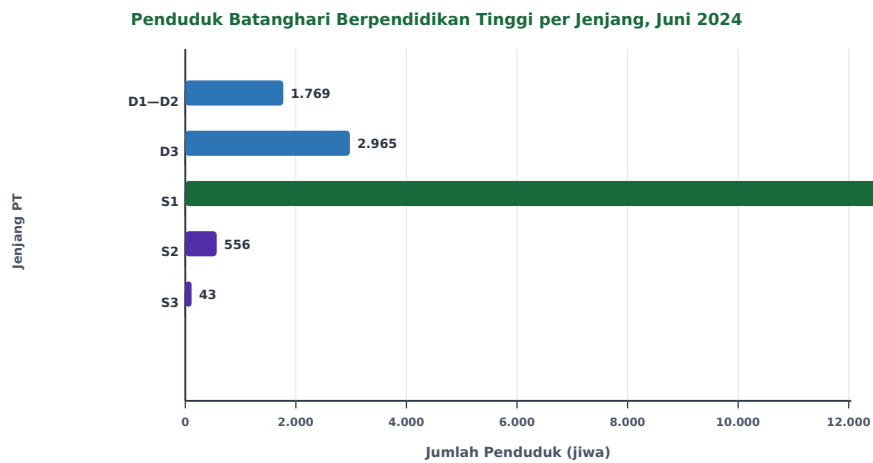
Distribusi Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Status dan Akreditasi, Batanghari 2024



Sumber: [DaftarSekolah.net/Dapodik](https://daftarsekolah.net/dapodik), 2024. Dari 17 SMA di Batanghari, 11 negeri dan 6 swasta; 8 sekolah (47,06%) meraih akreditasi A.

Menurut [DaftarSekolah.net](https://daftarsekolah.net) yang bersumber dari Dapodik (2024), 17 SMA di Kabupaten Batanghari terdiri atas 11 sekolah negeri (64,71%) dan 6 swasta (35,29%). Dalam hal kualitas, 8 SMA (47,06%) telah meraih akreditasi A — capaian yang cukup baik untuk kabupaten kategori rural di Provinsi Jambi. Lima sekolah berakreditasi B (29,41%) dan empat sekolah masih berakreditasi C (23,53%). Tidak ada SMA yang belum terakreditasi, menunjukkan kepatuhan sistem terhadap proses penjaminan mutu pendidikan.

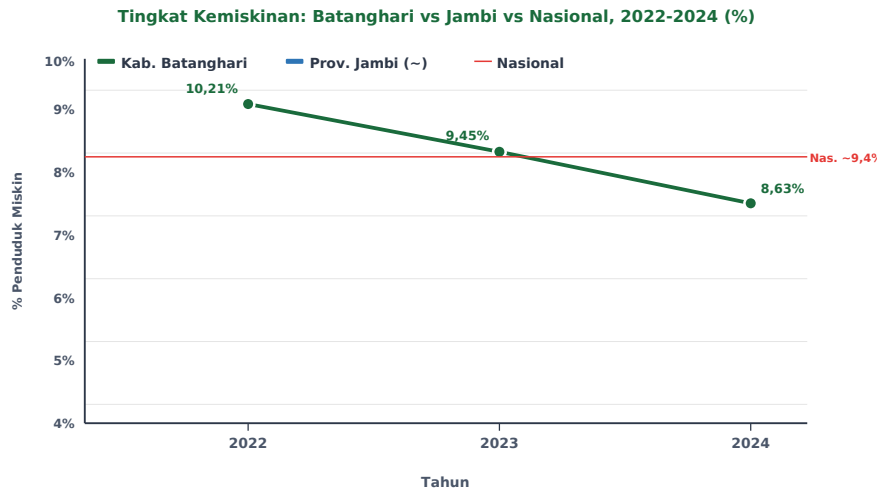
Komposisi Penduduk Batanghari Berdasarkan Pendidikan Tinggi, Juni 2024



Sumber: Dukcapil, Juni 2024. Dari 18.090 penduduk berpendidikan tinggi, 70,5% (12.750 jiwa) adalah pemegang gelar S1.

Menurut data Dukcapil (Juni 2024), dari total 18.090 penduduk Kabupaten Batanghari yang berpendidikan tinggi (D1—S3), sebagian besar adalah pemegang gelar S1 sebanyak 12.750 jiwa (70,5%). Pemegang D3 mencapai 2.965 jiwa, D1—D2 sebanyak 1.769 jiwa, sementara pemegang S2 hanya 556 jiwa dan S3 hanya 43 jiwa. Data ini mencerminkan keterbatasan SDM spesialis di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang berdampak pada ketersediaan tenaga ahli di sektor publik maupun swasta.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Batanghari Dibandingkan Provinsi Jambi, 2022-2024



Sumber: BPS Kabupaten Batang Hari, 2024. Kemiskinan Batanghari turun dari 10,21% (2022) menjadi 8,63% (2024), namun masih di atas rata-rata Provinsi Jambi. Data kemiskinan Prov. Jambi dan nasional menggunakan estimasi BPS 2024.

Menurut BPS Kabupaten Batang Hari (2024), tingkat kemiskinan Kabupaten Batanghari menunjukkan tren penurunan positif dari 10,21% (2022) menjadi 9,45% (Maret 2023) dan 8,63% (Maret 2024). Penurunan sebesar 0,82 poin persentase dalam satu tahun terakhir termasuk signifikan. Meski demikian, angka ini masih berada di atas rata-rata Provinsi Jambi. Tingkat kemiskinan berhubungan langsung dengan angka putus sekolah karena kendala ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong keluarga menarik anak dari bangku sekolah sebelum menyelesaikan wajib belajar.

Menurut data PDDikti dan sumber Universitas Batanghari (UNBARI), Kabupaten Batanghari dapat diakses dari Kota Jambi di mana Universitas Batanghari (UNBARI) berdiri sejak 1985 di bawah Yayasan Pendidikan Jambi. UNBARI terakreditasi **Baik Sekali** oleh BAN-PT (berlaku hingga Juni 2028) dan memiliki 5 Fakultas dengan 16 Program Studi, mencakup 13 prodi S1, 2 prodi S2, dan 1 prodi D3 di bidang sosial, ekonomi, hukum, keguruan, dan eksakta. Penerimaan mahasiswa baru tersedia melalui jalur SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri. Warga Batanghari yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi juga dapat mengakses universitas negeri di Kota Jambi seperti Universitas Jambi (UNJA) melalui jalur SNBP dan SNBT setiap tahun.

Berita Pendidikan Terkini Kabupaten Batanghari

Dinas Pendidikan Batang Hari Gelar Sosialisasi Pendampingan Revitalisasi untuk Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, dan SMP Tahun 2025

Dinas PDK Kabupaten Batanghari menyelenggarakan sosialisasi revitalisasi satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP, menekankan tiga prioritas: pemerataan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola berbasis data.

[Baca selengkapnya — Dinas PDK Kab. Batang Hari, 22 September 2025](#)

Cara Unik Bunda PAUD Zulva Fadhil Sosialisasikan 13 Tahun Wajib Belajar, Curi Perhatian Anak-anak di Batang Hari

Bunda PAUD Kabupaten Batanghari, Zulva Fadhil, menggunakan pendekatan kreatif untuk mensosialisasikan program Wajib Belajar 13 Tahun kepada anak-anak dan orang tua di wilayah Batanghari.

[Baca selengkapnya — Dinas PDK Kab. Batang Hari, 2025](#)

Pemkab Batang Hari Serahkan Bantuan Seragam Sekolah untuk Siswa Berprestasi dan Tidak Mampu

Pemerintah Kabupaten Batanghari menyerahkan bantuan seragam sekolah bagi siswa berprestasi dan siswa dari keluarga tidak mampu sebagai bentuk dukungan akses pendidikan di wilayah tersebut.

[Baca selengkapnya — Dinas PDK Kab. Batang Hari, 2025](#)

Gizi Optimal, Tumbuh Kembang Maksimal: Dinas Pendidikan Batang Hari Memantau Program PMT untuk Anak PAUD/TK

Dinas Pendidikan Batanghari aktif memantau pelaksanaan Program Makanan Tambahan (PMT) bagi anak PAUD dan TK untuk mendukung tumbuh kembang optimal dan kesiapan belajar anak usia dini.

[Baca selengkapnya — Dinas PDK Kab. Batang Hari, 2025](#)

BalaiWarga.NET	Cetak PDF
----------------	-----------

Mengukir Generasi Emas: SDN 77/I Penerokan Gelar "Panen Karya 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat"

SDN 77/I Penerokan, Kabupaten Batanghari, menggelar kegiatan Panen Karya bertema 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai wujud implementasi program karakter nasional Kemendikdasmen di sekolah dasar.

[Baca selengkapnya — Dinas PDK Kab. Batang Hari, 2025](#)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari Tegaskan Komitmen Dukung Tumbuh Kembang Optimal Peserta Didik

Pada 17 Juli 2025, Dinas PDK Batanghari menegaskan komitmennya untuk mendukung tumbuh kembang optimal peserta didik melalui berbagai program pendidikan dan kebudayaan yang berjalan di kabupaten.

[Baca selengkapnya — Dinas PDK Kab. Batang Hari, 17 Juli 2025](#)

Ini Penetapan Jadwal Libur Sekolah dari Dinas Pendidikan Batang Hari

Dinas PDK Kabupaten Batanghari resmi menetapkan jadwal libur sekolah semester dua tahun ajaran 2025/2026 berlangsung 20 Juni hingga 4 Juli 2026, disertai imbauan agar siswa mengisi liburan dengan kegiatan positif.

[Baca selengkapnya — Jambi Independent, Juni 2026](#)

Pembahasan: Apa Kata Data dan Berita untuk Warga Batanghari

Membaca Pola Data Pendidikan: Kesenjangan Akses dan Mutu di Kabupaten Batanghari

Data pendidikan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menggambarkan pola yang kompleks. Di satu sisi, terdapat capaian positif: 47,06% SMA telah berakreditasi A menurut DaftarSekolah.net/Dapodik (2024), dan tingkat kemiskinan turun menjadi 8,63% pada Maret 2024 (BPS, 2024). Di sisi lain, 36,68% penduduk belum atau tidak pernah tamat SD (Dukcapil, 2024), dan hanya 5,9% yang mengenyam

pendidikan tinggi. Dalam kerangka konsep yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara melalui asas Tut Wuri Handayani, rendahnya partisipasi pendidikan di Batanghari mencerminkan perlunya dorongan yang konsisten dari berbagai pihak agar setiap anak dapat mengakses layanan pendidikan formal. Konteks geografis Batanghari sebagai wilayah yang dilintasi Sungai Batanghari dengan sebaran permukiman rural yang luas turut berkontribusi pada tantangan aksesibilitas sekolah, terutama di kecamatan terpencil. Menurut H.A.R. Tilaar, disparitas kualitas antardaerah — seperti yang terlihat dari kesenjangan akreditasi antara SMA (47% terakreditasi A) dan SMP (13,11%) — merupakan fenomena sosiologi pendidikan yang lazim pada wilayah dengan karakteristik peri-urban dan rural. Warga dapat menggunakan data akreditasi di [ban-pdm.id](#) sebagai salah satu referensi awal sebelum memilih sekolah untuk anak.

Sintesis Berita: Program dan Kebijakan Pendidikan yang Berjalan di Batanghari

Berita-berita terkini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batanghari (2025) menunjukkan pola konsisten: pemerintah daerah aktif menjalankan program revitalisasi satuan pendidikan, pemantauan gizi PAUD, sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun, dan pemberian bantuan seragam bagi siswa kurang mampu. Program-program ini sejalan dengan kerangka kebijakan nasional Merdeka Belajar dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang menargetkan 18,59 juta siswa secara nasional pada 2025. Dalam pandangan Arief Rachman tentang pendidikan humanis dan pengembangan potensi holistik, program revitalisasi PAUD—SD—SMP yang dilakukan Dinas PDK Batanghari dengan tiga prioritas — akses, mutu, dan tata kelola — merupakan langkah yang selaras dengan cita-cita pendidikan berkarakter. Mubyarto juga menekankan pentingnya intervensi human capital pada keluarga rentan untuk memutus mata rantai kemiskinan, yang relevan dengan program bantuan seragam dan PIP di Batanghari. Tidak terdapat regulasi daerah khusus (otonomi khusus/Qanun) yang membedakan tata kelola pendidikan di Batanghari; berlaku Perda Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai payung hukum utama. Warga yang memiliki anak usia PAUD dapat mendaftarkan ke lembaga PAUD terdekat untuk mendukung transisi PAUD—SD yang telah menjadi prioritas Dinas PDK Batanghari.

Pertanyaan Warga tentang Pendidikan di Kabupaten Batanghari

Bagaimana cara mengecek akreditasi sekolah di Kabupaten Batanghari?

Warga dapat mengecek akreditasi sekolah di Kabupaten Batanghari secara daring melalui situs BAN-PDM di [ban-pdm.id](#). Cukup ketik nama sekolah atau NPSN di kolom pencarian untuk melihat status akreditasi, masa berlaku, dan nilai akreditasi masing-masing satuan pendidikan.

Bagaimana cara mengakses Program Indonesia Pintar (PIP) untuk siswa di Batanghari?

Siswa yang memenuhi syarat PIP dapat mengecek status penerima di pip.kemdikbud.go.id menggunakan NISN dan NIK. Orang tua dapat menghubungi pihak sekolah untuk proses usulan, memastikan data NISN aktif di Dapodik, serta mengaktifkan rekening penerima di bank yang ditunjuk pemerintah.

Berapa jumlah SMA dan SMK di Kabupaten Batanghari?

Menurut data DaftarSekolah.net yang bersumber dari Dapodik, terdapat 17 SMA (11 negeri, 6 swasta) dan 11 SMK (9 negeri, 2 swasta) di Kabupaten Batanghari, Jambi. SMA dengan akreditasi A mencapai 47,06% dari total SMA yang ada.

Apa saja perguruan tinggi yang dapat diakses oleh lulusan SMA dari Batanghari?

Lulusan SMA dari Kabupaten Batanghari dapat mengakses Universitas Batanghari (UNBARI) di Kota Jambi, yang terakreditasi Baik Sekali oleh BAN-PT. UNBARI memiliki 5 fakultas dengan 16 program studi jenjang S1, S2, dan D3. Jalur penerimaan tersedia melalui SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri.

Apa yang dimaksud dengan program Wajib Belajar 13 Tahun dan bagaimana penerapannya di Batanghari?

Program Wajib Belajar 13 Tahun adalah kebijakan nasional yang memperluas wajib belajar dari 12 tahun (SD—SMA) menjadi 13 tahun dengan menambahkan jenjang PAUD/TK. Di Kabupaten Batanghari, Bunda PAUD Zulva Fadhil aktif mensosialisasikan program ini kepada anak-anak dan orang tua sepanjang tahun 2025.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai informasi awal dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan data dan referensi yang tersedia hingga tanggal publikasi. Konten ini bersifat edukatif dan tidak menggantikan saran profesional, konsultasi langsung, atau kebijakan resmi yang berlaku. Selalu verifikasi ke instansi terkait, asosiasi industri, atau sumber primer yang relevan.